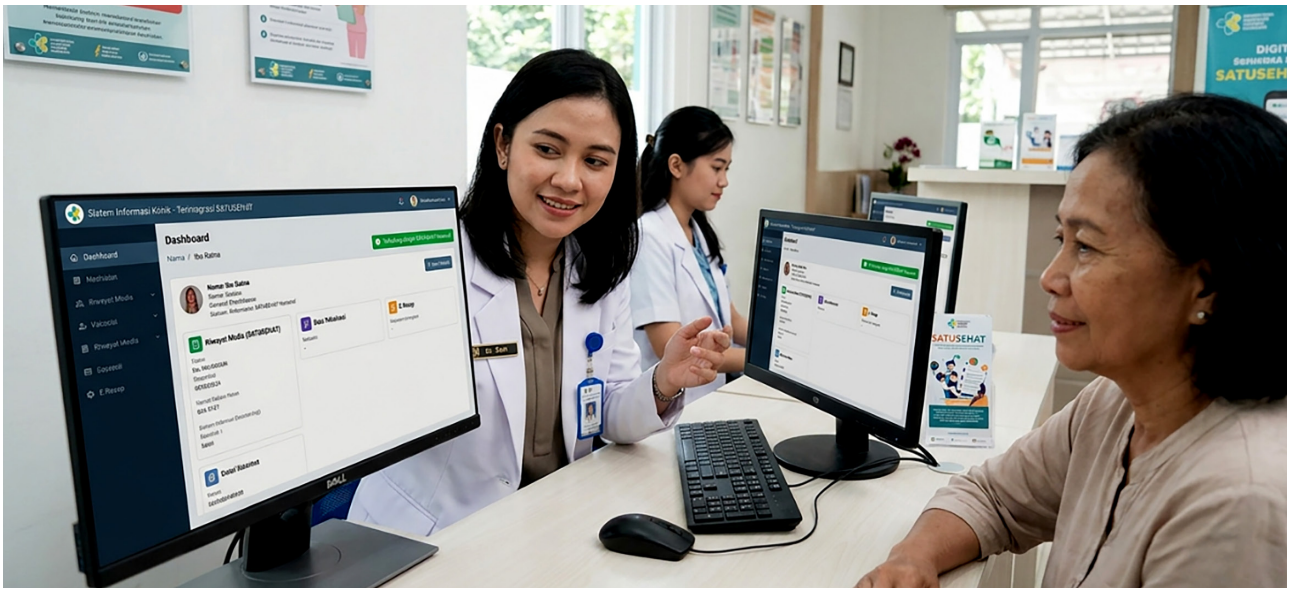
NADI
Advancing Development & Innovation

ARTIKEL OPINI
OKTOBER 2026

Revolusi Kesehatan Publik Indonesia: Sejauh Mana UU Kesehatan Mengubah Cara Kita Membangun Kesehatan?

oleh dr. Pandu Riono, Ph.D.

Disclaimer: Pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan atau posisi NADI dan organisasi afiliasi lainnya.



Implementasi SATUSEHAT pada Sistem Informasi Klinik. (Sumber foto: teramedikce.com)

Revolusi Kesehatan Publik di Indonesia

Revolusi Kesehatan Publik di Indonesia bukanlah sekadar memperbaiki sistem, melainkan mengubah fondasi dan cara pandang seluruh ekosistem kesehatan. Ini adalah sebuah transformasi besar yang menyentuh kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, hingga pola pikir masyarakat.

Kementerian Kesehatan RI sendiri telah merumuskan Enam Pilar Transformasi Kesehatan sebagai cetak biru untuk revolusi ini. Implementasi dari pilar-pilar ini secara radikal akan menggeser fokus dari paradigma pengobatan yang reaktif menjadi paradigma pencegahan dan promosi kesehatan yang proaktif.

Untuk pilar pertama, yaitu Transformasi Layanan Primer, pemerintah telah mengimplementasikan penguatan infrastruktur dan program pendukung seperti Integrasi Layanan Primer (ILP), revitalisasi Posyandu, perluasan skrining kesehatan, serta digitalisasi layanan kesehatan melalui SATUSEHAT. Sementara untuk pilar Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, perlu diwujudkan **sistem surveilans kesehatan masyarakat yang proaktif** untuk mendukung deteksi dini, pemantauan penyakit, hingga penanggulangan wabah secara cepat dan efektif. Dengan demikian, berbagai pilar transformasi kesehatan saling melengkapi dan memperkuat **kesinambungan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.**

© 2026 Inke Maris & Associates dan NADI. Hak Cipta Dilindungi.



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Adanya pihak yang tidak setuju terhadap reformasi kesehatan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman yang mendorong ketegangan antara upaya pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran demi kepentingan publik dengan kekhawatiran dari pihak-pihak yang merasa hak dan perannya dalam sistem kesehatan berpotensi tergerus.

Pemerintah dan beberapa pakar kesehatan publik berpendapat bahwa transformasi kesehatan sebagai revolusi kesehatan publik diperlukan karena:

- **Pemerataan Tenaga Kesehatan:** Organisasi profesi selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan pendistribusian dokter, terutama dokter spesialis, ke seluruh wilayah Indonesia.
- **Simplifikasi Birokrasi:** Proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu diharapkan dapat disederhanakan dengan sistem yang terpusat.
- **Fokus pada Pelayanan Publik:** Perubahan mendasar bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada kepentingan profesi.

UU Kesehatan: Regulasi yang Revolusioner

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menetapkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan kesehatan publik di Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pergeseran paradigma dari fokus pengobatan ke pencegahan dan promosi kesehatan.

UU Kesehatan secara eksplisit menekankan pentingnya upaya **promotif** (promosi kesehatan) **dan preventif** (pencegahan penyakit) sebagai prioritas utama. Ini menandai perubahan besar dari UU Kesehatan sebelumnya yang lebih berfokus pada pelayanan kuratif (pengobatan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara menyeluruh, bukan hanya mengobati orang yang sakit.

© 2026 Inke Maris & Associates dan NADI. Hak Cipta Dilindungi.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menghilangkan **ketimpangan akses** terhadap layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang merata, serta memastikan biaya layanan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Selain itu, prinsip **ketahanan sistem kesehatan** dalam UU Kesehatan sangat ditekankan pasca pandemi COVID-19. UU ini berupaya membangun sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan responsif menghadapi gangguan kesehatan, seperti wabah atau bencana, sehingga sistem tidak mudah lumpuh.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan program kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. UU ini mendorong **partisipasi aktif masyarakat** dalam berbagai upaya kesehatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program.

Integrasi teknologi dalam sistem kesehatan juga merupakan kemajuan yang diakui dari UU Kesehatan. Hal ini mencakup penggunaan kecerdasan artifisial (AI), teknologi informasi lainnya, rekam medis elektronik, dan pengembangan industri kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kesehatan publik adalah isu yang multidimensi. UU Kesehatan ingin mengedepankan **kerjasama antar sektor**, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sektor lain yang berperan dalam menentukan kesehatan publik.

Pada akhirnya, Revolusi Kesehatan Publik di Indonesia merupakan langkah transformasional. Peralihan dari pendekatan kesehatan yang berfokus pada pengobatan menuju pencegahan serta promosi kesehatan secara proaktif adalah arahan transformasi yang strategis dan tepat sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan. Keberhasilan revolusi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam merangkul, mendukung, dan menerapkan budaya hidup sehat demi terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

© 2026 Inke Maris & Associates dan NADI. Hak Cipta Dilindungi.

Tentang Penulis



dr. Pandu Riono, Ph.D.

Pakar Kesehatan Masyarakat

dr. Pandu Riono, Ph.D. merupakan epidemiolog kesehatan masyarakat dan akademisi senior dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam surveilans penyakit, proyeksi epidemiologi, dan penelitian kesehatan di Indonesia. Keahliannya mencakup penyusunan rekomendasi strategis berbasis data bagi berbagai pemangku kepentingan dalam penguatan kebijakan dan sistem kesehatan. Beliau merupakan staf senior di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, serta memiliki gelar dokter dari Universitas Indonesia, MPH dari *University of Pittsburgh,* dan PhD di bidang Epidemiologi dari *University of California, Los Angeles* (UCLA). Beliau juga pernah menjadi konsultan teknis untuk Kementerian Kesehatan, UNICEF, WHO, dan berbagai mitra internasional lainnya.

© 2026 Inke Maris & Associates dan NADI. Hak Cipta Dilindungi.

NADI
Advancing Development & Innovation

INKE & MARIS
ASSOCIATES

NADI adalah platform strategis untuk kolaborasi. Mari berkolaborasi bersama NADI untuk mendorong riset dan publikasi kesehatan yang berdampak.

HUBUNGI KAMI:

www.nadi-health.id

www.inkemaris.com

+6221-828-1250

+62-816-210-028

© 2026 Inke Maris & Associates dan NADI. Hak Cipta Dilindungi.